

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

## Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Alikha Novira <sup>a</sup> dan Nevila Putri Suherman <sup>b</sup>

<sup>a,b</sup> Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>a</sup>alikh@poltek.stialanbandung.ac.id

### Abstrak

Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bappeda Kabupaten Garut. Kabupaten Garut adalah salah satu Kabupaten yang tingkat keterisian data dalam SIPD mengalami peningkatan yang masih jauh dari data yang harus terisi. Artinya peningkatan keterisian data masih rendah dan harus ditingkatkan kembali. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori Edward III ditemukan bahwa penerapan kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Garut masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada dimensi Sumber Daya menurut Edward III bahwa Sumber daya manusia dan fasilitas penunjang masih kurang. Selain itu, disposisi mengenai sikap pelaksana masih banyak yang tidak disiplin. Salah satu kelemahan dalam kebijakan ini adalah belum adanya mekanisme mempermudah Bappeda dalam melakukan evaluasi data dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk meningkatkannya Bappeda Kabupaten Garut dapat menerapkan beberapa hal seperti, memberikan peringatan mengenai ketidakdisiplinan pegawai, membuat Standar Operasional Prosedur, membuat form pengaduan permasalahan server SIPD dan dilengkapi dengan format kritik dan saran SIPD sebagai bahan evaluasi, serta memberikan sanksi tegas kepada SKPD yang terlambat bahkan tidak melakukan pengisian data SIPD.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, sistem informasi, Sistem Informasi Pemerintah Daerah

## *Implementation of Local Government Information System Policy at The Regional Development Planning Agency Of Garut Regency*

### *Abstract*

*This article analyzes the implementation of the Local Government Information System policy in Bappeda Garut Regency. Garut Regency is one of the regencies where the level of data entry in the SIPD has increased, which is still far from the data that must be filled in. This means that the increase in data content is still low and must be increased again. The type of research approach used is a qualitative approach. By using Edward III's theory it was found that the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) policy in Bappeda Garut Regency was still not going well, this can be seen in the Resources dimension according to Edward III that human resources and supporting facilities were still lacking. In addition, many of the dispositions regarding the attitude of executors are undisciplined. One of the weaknesses in this policy is that there is no mechanism to facilitate Bappeda in evaluating data and formulating Standard Operating Procedures (SOP). To improve this, Bappeda Garut Regency can implement several things, such as providing warnings regarding employee indiscipline, creating Standard Operating Procedures, creating a complaint form for SIPD server problems and equipped with a format for SIPD criticism and suggestions as evaluation material, as well as giving strict sanctions to SKPD who are late or not fill in SIPD data.*

**Keywords:** *policy implementation, information system, Local Government Information System Policy*

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

## A. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dengan adanya perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan pembangunan yang baik akan membuat pembangunan yang baik pula. Dalam membuat perencanaan yang baik dibutuhkan kualitas data yang *valid*, akurat juga lengkap. Hal tersebut menjadi permasalahan di Indonesia sendiri kurang lengkapnya data dan informasi yang tersedia menghambat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat sebuah inovasi kebijakan demi mendukung ketersediaan data yang *valid*, akurat dan lengkap yaitu sebuah sistem informasi.

Pengembangan suatu sistem informasi yang terintegrasi mulai dari daerah hingga pusat merupakan suatu langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam upaya penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Pengembangan suatu sistem informasi yang terintegrasi mulai dari daerah hingga pusat merupakan suatu langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam upaya penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat. Salah satu inovasi kebijakan yang dapat membantu hal tersebut yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau yang lebih dikenal dengan SIPD.

Inovasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi sebuah investasi awal dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara lebih luas yang tidak hanya mencakup teknologi informasi, melainkan seluruh pranata dan media informasi yang berkaitan dengan informasi Pemerintah Republik Indonesia. Tiada lain tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk membangun suatu infrastruktur handal yang mendukung pelaksanaan tugas Negara terutama dalam menuju taraf *good governance* dengan akuntabilitas yang tinggi dan mendapatkan kepercayaan

penyempurna dari masyarakat. *Good governance* adalah suatu konsep pelayanan publik yang efisien dan berkeadilan meliputi bidang sosial politik dan ekonomi serta berkaitan dengan fungsi- fungsi badan penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (KAUR, 2008).

SIPD merupakan suatu *support system* dalam pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian *good governance* (Amryudin, A. D. K, dkk, 2021). Sistem informasi juga bermanfaat untuk menunjang kerjasama antara pemerintah daerah dengan menggunakan sistem informasi berbasis data dan informasi. Tujuan akhirnya adalah untuk membangun *database* pada suatu daerah tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi, sumber daya, perekonomian dan sebagainya dimana penggambaran tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan sistem informasi pengelolaan *database* profil daerah yang akurat dan *valid*. Dalam tataran teknis dan operasional, adopsi teknologi atau sistem informasi menjadi penting untuk membangun kesinambungan dalam penyampaian pelayanan publik bagi Masyarakat (Sufianti et al, 2020; Ramdani, 2019).

SIPD adalah sebuah sistem informasi berbasis *web* yang memuat data mengenai sistem pembangunan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah lainnya. SIPD berperan sebagai jaringan/tempat yang bermanfaat untuk mengumpulkan data secara daring, *realtime*, dan terpadu di pusat bahkan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga kinerja pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Adanya SIPD dapat membantu meningkatkan perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih baik. Perencanaan pembangunan daerah adalah serangkaian proses yang meliputi berbagai tahapan penyusunan yang melibatkan berbagai komponen di dalamnya, guna memanfaatkan dan mengalokasikan berbagai macam sumber daya untuk menunjang kesejahteraan sosial pada daerah dalam jangka waktu tertentu. Keterkaitan

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah perencanaan tidak dapat dipisahkan.

Dibuatnya SIPD dilatar belakangi karena kurangnya pemanfaatan atas data pembangunan dikarenakan data pembangunan di daerah tidak lengkap dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) jarang memperbaharui data, oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai unit perencanaan pembangunan terhambat dalam proses mengumpulkan data untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bappeda adalah sebuah satuan kerja ditingkat yang berwenang atas perencanaan pembangunan daerah, dengan seorang kepala badan yang memimpinya di mana kepala bapada tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah yakni gubernur atau bupati atau walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Bappeda yang bertugas dalam mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksana pembangunan.

Kebijakan SIPD ini sangat berdampak baik kepada pemerintah daerah, karena sebelum adanya sistem ini Bappeda selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah dalam mengumpulkan data mengenai pembangunan harus secara manual dengan meminta kepada seluruh SKPD untuk datang ke kantor Bappeda. Hal tersebut menghambat kinerja Bappeda dalam segi waktu menjadi terlambat, pemerintah pusat menjadi sulit melakukan pemantauan dan evaluasi (Puspitasari dan Novira, 2022). Namun, dengan adanya sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keefektifan dari kinerja Bappeda, serta pada seluruh SKPD. Oleh karena itu Bappeda memiliki peranan yang esensial dalam penggunaan SIPD.

Penggunaan SIPD ini telah dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah, salah satunya Pemerintah Kabupaten Garut. Adanya sistem tersebut memudahkan Bappeda Kabupaten Garut dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengawasan dan evaluasi pelayanan public di Pemerintah Kabupaten Garut menjadi lebih cepat. Namun, pada kenyataannya penerapan SIPD ini cukup sulit dilakukan karena minimnya penggunaan teknologi informasi membuat

keterisian data dalam SIPD tidak lengkap. Dalam hal ini juga terdapat beberapa permasalahan lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan SIPD, sehingga pada tulisan ini akan dilihat bagaimana penerapan kebijakan SIPD pada Bappeda Kabupaten Garut dengan menggunakan teori analisis Kebijakan George Edward III.

## B. PEMBAHASAN

Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah diatur dalam Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah pusat dan langsung diterapkan diseluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia, salah satunya instansi pemerintah daerah Bappeda Kabupaten Garut. Bappeda Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang langsung menerapkan kebijakan program ini ketika program ini dikeluarkan pada tahun 2016. Untuk melihat berhasil atau belumnya kebijakan program ini di Bappeda Kabupaten Garut, akan diuraikan tujuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Garut yang dipilih dalam penelitian ini.

Aktor kebijakan yang terlibat dalam kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah Bappeda Kabupaten Garut dan seluruh instansi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Garut. Bappeda Kabupaten Garut merupakan badan yang bertanggung jawab dalam jalannya implementasi SIPD di Kabupaten Garut. Namun implementasi ini sulit dilakukan mengingat SIPD merupakan sebuah sistem yang dimana sistem tersebut selalu mengalami pembaharuan dan kebijakan yang terus diperbaharui juga membuat implementasi SIPD ini sulit dilakukan secara optimal.

Bappeda Kabupaten Garut merupakan salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Garut yang bertanggung jawab dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak tahun 2016. Edward III dalam Agustino (2016) menjelaskan terdapat empat faktor penunjang kesuksesan implementasi kebijakan. Untuk menilai pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Garut ini dilakukan analisis menggunakan teori analisis Kebijakan George Edward III dengan empat variabel, yaitu sebagai berikut :

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

## a. Komunikasi

Pada indikator ini yaitu komunikasi sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Kegiatan komunikasi sangatlah penting dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam sebuah kebijakan, karena jika kebijakan tidak disampaikan dengan baik dalam artian adanya miskomunikasi, kebijakan akan disalah artikan. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bappeda Garut dalam meningkatkan penggunaan SIPD. Menurut Edward terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Berikut penjelasannya :

1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa komunikasi yang dilakukan semenjak adanya Covid-19 ini Bappeda dengan SKPD Kabupaten Garut sulit melakukan komunikasi secara langsung dikarenakan adanya larangan untuk melakukan kegiatan pertemuan di Bappeda. Namun, dalam mengatasi hal tersebut Bappeda menggunakan beberapa media seperti zoom meeting dalam meningkatkan koordinasi penggunaan SIPD tapi tidak berjalan baik. Apabila melihat dari indikator transmisi yaitu penyaluran komunikasi dari Bappeda sendiri telah dilakukan kepada SKPD dan sesuai dengan panduan yang telah diberikan dari pusat. Akan tetapi, untuk penyaluran komunikasi ini memang sulit dilakukan kepada beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Garut mengingat kondisi yang sedang pandemi sekarang dan memang pemerintah Garut sendiri banyak melakukan komunikasi secara online dengan SKPD Kabupaten Garut tanpa memperhatikan hal seperti sinyal dan teknologi lainnya membuat beberapa permasalahan seperti banyaknya SKPD yang tidak ikut bergabung dalam melakukan sosialisasi maupun rapat koordinasi. Permasalahan lainnya yaitu penyampaian yang dilakukan mengenai SIPD ini disampaikan secara teori tidak dengan praktiknya, padahal SIPD menjadi penunjang dalam pembuatan dokumen perencanaan, pembangunan daerah, pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut yang menjadi kendala SKPD lambat dalam memberikan data kedalam SPD.

2) Kejelasan, komunikasi yang diterima harus jelas. Dalam melakukan komunikasi Bappeda dengan

SKPD dalam penggunaan SIPD ini dilakukan dengan sosialisasi, rapat koordinasi dan sebagainya. Kejelasan informasi yang diberikan sudah jelas sesuai dengan yang diberikan dari pusat ke daerah, akan tetapi dalam penyampaian praktik secara nyata masih belum dilakukan secara langsung.

3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten. Dalam memberikan informasi Bappeda kepada SKPD mengenai pelaksanaan SIPD sebelumnya telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Komunikasi antara Bappeda dengan SKPD di Kabupaten Garut konsisten karena Bappeda Kabupaten Garut berkoordinasi dengan Bappeda Jawa Barat dalam pelaksanaan SIPD ini, lalu setelah itu Bappeda Garut memberikan informasi tersebut dengan sama yang telah diperintahkan oleh Bappeda Jawa Barat.

## b. Sumber Daya

Sumber daya merukan sebuah kunci dari berjalannya suatu organisasi. Dalam implementasi SIPD ini sumber daya berperan penting dalam pelaksanaannya agar menjadi lebih baik. Menurut Edward, sumber daya tidak hanya berwujud manusia, tetapi juga faktor- faktor lain yang dapat mendukung berjalannya suatu kebijakan. Menurutnya, sumber daya dalam organisasi terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Berikut penjelasan Implementasi SIPD mengenai sumber daya yaitu :

1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Dalam implementasi SIPD di Bappeda staf memiliki peran penting dalam pelaksanaan penggunaan SIPD dari mulai input data, pengolahan data, evaluasi data dari seluruh SKPD semuanya dilakukan oleh staf Bappeda Kabupaten Garut. Sumber Daya Manusia (SDM) di Bappeda Garut memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi SIPD. Dalam menjalankan tugasnya Kasubbid menjalankan tugasnya sesuai dengan SKPD yang menjadi tanggung jawabnya jadi tidak saling ikut campur satu sama lain dikarenakan tugasnya sudah jelas. Akan tetapi terjadi permasalahan dalam pengisian SIPD dikarenakan banyak SKPD yang tidak memperbaharui data bahkan tidak mengisi data kedalam SIPD.

2) Informasi, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

dengan cara melaksanakan kebijakan. Dalam hal tersebut telah diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah lengkap dengan peraturan penggunaan, pihak-pihak yang berwenang, bahkan dalam lampiran sudah terdapat tata cara evaluasi data SIPD. Yang kedua, mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah diterapkan. Informasi dalam implementasi kebijakan ini telah berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019, Bappeda Kabupaten Garut sudah menjalankan hal tersebut, tapi untuk pelaksana lainnya yaitu SKPD Kecamatan dalam menggunakan SIPD kepatuhannya sangat kurang dikarenakan masih ada yang sering terlambat, tidak memperbaharui data bahkan tidak mengisi data.

3) Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Mengenai wewenang dalam SIPD ini Bappeda Kabupaten Garut menjadi ketua dan penanggung jawab dalam pelaksanaan SIPD ini. Bappeda Kabupaten Garut sendiri melakukan evaluasi data sebanyak 70 SKPD yang ada di Bappeda Kabupaten Garut. Hal tersebut telah diatur dalam Permendagri 70 Tahun 2019 bahwa di pemerintah daerah Bappeda Kabupaten Garut yang menjadi ketua dalam pelaksanaan SIPD ini.

4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan SIPD yang dimana penggunaannya menggunakan teknologi informasi dibutuhkan fasilitas yaitu komputer, sinyal dan sebagainya. Fasilitas yang dibutuhkan sangat mempengaruhi kinerja Bappeda dalam mengelola SIPD, dibutuhkan fasilitas yang memadai dalam menunjang kinerja Bappeda dan SKPD yang ada di Kabupaten Garut. Fasilitas penunjang sangat bermanfaat dalam pengimplementasian sebuah kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penelitian, komputer hanya mempunyai dua itupun sudah server dahulu sedangkan laptop yang digunakan para Kasubbid banyak yang bermasalah dikarenakan digunakan terus menerus mengakibatkan sering terjadi masalah. Selain fasilitas di Bappeda, fasilitas yang ada di SKPD lainnya juga perlu diperhatikan dikarenakan terdapat permasalahan tidak diperbaharainya data, tidak menginput data bahkan ketidakterisian data. Hal tersebut terjadi bisa saja dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai.

## c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan sikap pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Menurut Edward III, jika ingin berhasil dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi menurut Edward III antara lain:

1) Kurang adanya disiplin pegawai Bappeda. Pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Sikap para pelaksana yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. Seperti halnya dalam pelaksanaan SIPD, jika pemerintah kabupaten membuat kebijakan untuk perekrutan pegawai yang mengenai SIPD, maka pemerintah harus memilih pegawai yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan SIPD tersebut. Jika pegawai yang menangani SIPD tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut maka pelaksanaan SIPD tidak akan berjalan baik.

Dedikasi yang tinggi juga sangat diperlukan agar terlaksananya pelaksanaan kebijakan yang baik. Seperti pegawai yang tinggal di daerah yang cukup jauh dari kantor Bappeda Kabupaten Garut, sering terlambat merupakan ketidakdisiplinan yang akan menjadi penghambat dalam melakukan suatu pelayanan di Bappeda.

2) Insentif, Menurut Edward III dalam mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi. Seperti dalam pelaksanaan SIPD, karena kebijakan SIPD

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

merupakan sebuah inovasi kebijakan yang menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang peningkatan pembangunan daerah yang lebih baik melalui data- data yang valid, akurat dan lengkap. Penggunaan SIPD ini semakin terus digencarkan dari mulai penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA dan KAUAPPAS, yang dimana semua data ini harus dimasukkan secara online. Maka dari itu, penggunaan SIPD harus digunakan dengan benar.

Pemberian insentif kepada pegawai Bappeda diharapkan agar pegawai Bappeda yang melakukan pengelolaan data SIPD dapat semangat dan melakukan pekerjaan dengan sebaik- baiknya. Insentif perlu dilakukan kepada pegawai operator agar pelaksanaan SIPD berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

#### d. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni standard operational procedure (SOP) dan fragmentasi. Berikut penjelasannya :

1) Standard Operational Prosedure (SOP), Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur- prosedur dasar kerja (standard operational procedure). Dalam implementasi kebijakan SIPD ini belum memiliki SOP. Ketidakterediaan SOP ini memang sudah lama, dikarenakan sebelumnya hal tersebut tidak berpengaruh karena adanya Surat Keterangan pembagian kerja. Akan tetapi, itu menjadi sebuah hambatan karena banyak dari SKPD yang belum mengetahui prosedur- prosedur pengelolaan SIPD.

2) Fragmentasi, Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab pada beberapa organisasi. Fragmentasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi dikarenakan semakin tersebar tanggung jawab pada banyak organisasi maka semakin memerlukan koordinasi yang lebih intensif, apabila tidak maka akan dengan mudah terjadi kesalahpahaman yang akan menghambat keberhasilan suatu implementasi. Sebaliknya jika tanggungjawab dipegang oleh satu organisasi saja maka akan dapat dengan

mudah mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam implementasi SIPD, Bappedalah yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Aktor pelaksana dalam implementasi SIPD adalah Bappeda Kabupaten Garut selaku Badan yang bertanggung jawab mengenai validasi data SIPD. Pelaksana terdapat pada lingkup SKPD Kabupaten Garut, sehingga koordinasi yang dilakukan cukup sulit. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi dengan tim operator setiap SIPD dari instansi terkait yang dilakukan 6 bulan sekali, serta dapat dilaukan sewaktu- waktu apabila terdapat kesulitan atau terjadi suatu permasalahan. Sedangkan dalam pelibatan pihak luar seperti dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, itu dilakukan ketika terjadi kesalahan pada server SIPD juga pengembangan SIPD menjadi lebih baik.

#### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Garut sudah terlaksana dengan baik tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Berdasarkan analisis implementasi menggunakan teori George Edward III yang terdiri dari 4 indikator, diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan Bappeda sudah cukup baik dengan banyak melakukan Kerjasama dengan seluruh SKPD Kabupaten Garut dalam pengisian SIPD memiliki panduan yang jelas dari pusat. Namun, terjadi beberapa permasalahan seperti jadwal rapat yang tidak diperjelas, penjelasan panduan tidak dipraktikan. Hal tersebut membuat beberapa SKPD, tidak mengerti dalam pengisian SIPD. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bappeda Garut sudah baik dalam melakukan evaluasi data SIPD. Pegawai Bappeda memiliki Pendidikan yang cukup baik dan kinerja yang lama sehingga mendukung penggunaan SIPD, namun refocusing anggaran menjadi hambatan dalam meningkatkan fasilitas penunjang. Kualitas SDM pada operator tingkat SKPD rata- rata masih memiliki Pendidikan yang rendah, menghambat dalam penggunaan SIPD yang dimana terdapat data- data yang tidak diperbaharui, bahkan tidak keterisian data. Selain itu, sikap pelaksana yang tidak disiplin selalu terlambat menjadi hal yang mempengaruhi, dan belum mempunyai SOP juga menjadi pengaruh bagi SKPD di Kabupaten Garut dalam menggunakan SIPD.

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Untuk itu Bappeda Kabupaten Garut, dapat menerapkan beberapa hal seperti, memberikan peringatan mengenai ketidakdisiplinan pegawai, membuat Standar Operasional Prosedur, membuat form pengaduan permasalahan server SIPD dan dilengkapi dengan format kritik dan saran SIPD sebagai bahan evaluasi, serta memberikan sanksi tegas kepada SKPD yang terlambat bahkan tidak melakukan pengisian data SIPD.

## REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amrynudin, A. D. K., Dharmaningtias, D. S., Savira, E. M., Katharina, R., & Sejati, S. B. (2021). *Kebijakan Satu Data Indonesia*. Publica Indonesia Utama.
- KAUR, B. K. D. K. (2008). *Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR*. In Pemerintah Kabupaten KAUR (Vol. 1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 6(2), 108–118. <https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.879001>
- Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22 (2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>.
- Sufianti, E., Jubaedah, E., Abdullah, S. (2020). Building Sustainability of Public Service Innovation in Bandung City, West Java, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, pp. 19 – 24. 10.2991/assehr.k.210629.005